



2019

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dinas Pertanian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2°09'25.1" S 106°03'43.4" E

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan disclosure secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran dari visi, misi dan renstra yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerjan yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Disadari bahwa LKjIP Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini masih banyak kekurangan yang masih perlu perbaikan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami ucapkan terima kasih. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JUAIDI, SP., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720506 199803 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Komoditas Strategis dan Komoditas Unggulan Daerah, dengan indikatornya jumlah produksi padi, lada, karet dan populasi sapi capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019, secara berturut-turut adalah sebesar 37.829 ton (87,7%); 33.038 ton (75,82%); 56.164 ton (93,34%) dan jumlah populasi 15.039 ekor (104,44%).
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, dengan indikatornya Jumlah kelompok yang peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2019, secara berturut-turut adalah sebesar 38 poktan/pelaku usaha (95,00%), 36 poktan/pelaku usaha (360%), dan 15 poktan/pelaku usaha (107,14%).
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petanian, dengan indikator persentase Nilai Tukar Petani sebesar 89,12 Indeks NTP dengan capaian sebesar 91,11%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan sebagai isue strategis, antara lain: (1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan; (2) Sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran; (3) Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah; (4) Konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian; (5) Belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian; (6) Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas; (7) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi; (8) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi

tawar produk; (9) Belum Optimalnya peran penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani dan posisi tawar; dan (10) Terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Fungsi dan Tugas	4
1.3. Keadaan Pegawai	10
1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana (Aset)	12
1.5. Isu Strategis OPD	13
1.6. Keuangan	15
1.7. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Strategis	20
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi	20
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	21
2.1.4 Strategi, Kebijakan dan Program	22
2.2 Perjanjian Kinerja	27
2.3 Rencana Belanja dan Indikator Kinerja.....	28
2.4 Instrumen Pendukung	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Produksi Komoditas Strategis dan Unggulan Daerah	30
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani melalui peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian	34
3.3 Akuntabilitas Anggaran	36
3.4 Kendala Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Status serta Pangkat/Golongan pada Dinas Pertanian Tahun 2019	10
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pertanian pada Tahun 2019	11
Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pertanian pada Tahun 2019	11
Tabel 1.4. Jumlah pegawai Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jabatan per Desember 2019	11
Tabel 1.5. Jumlah pegawai Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sebaran di Unit Kerja	12
Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Proinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu	12
Tabel 1.7. Data Inventarisasi Aset Dinas Pertanian Proinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019	13
Tabel 1.8. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian Proinsi Kepulauan Bangka Belitung	16
Tabel 1.9. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian Proinsi Kepulauan Bangka Belitung	18
Tabel 2.1. Kerangka sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022	21
Tabel 2.2. Rumusan Pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	24
Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	26
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	27
Tabel 2.5. Rincian anggaran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	28
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019	29
Tabel 3.3. Data Statistik Perkembangan Komoditas dalam Indikator Kinerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019	31
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019	34
Tabel 3.5. Realisasi Keuangan dan Kegiatan APBD Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019	37
Tabel 3.6. Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersumber Dana APBN Tahun Anggaran 2019	38

Daftar Gambar / Grafik

	Halaman
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3
Grafik 3.1. Capaian Kinerja Produksi Komoditas Strategis dan Unggulan Daerah Tahun 2017 – 2019	32
Grafik 3.2. Capaian Kinerja Perkembangan NTP-Pertanian Tahun 2017 – 2019	36

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Keadaan Pegawai
4. Keadaan Sarana dan Prasarana (Aset)
5. Isu Strategis
6. Keuangan
7. Sistematika LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2019 diharapkan dapat :

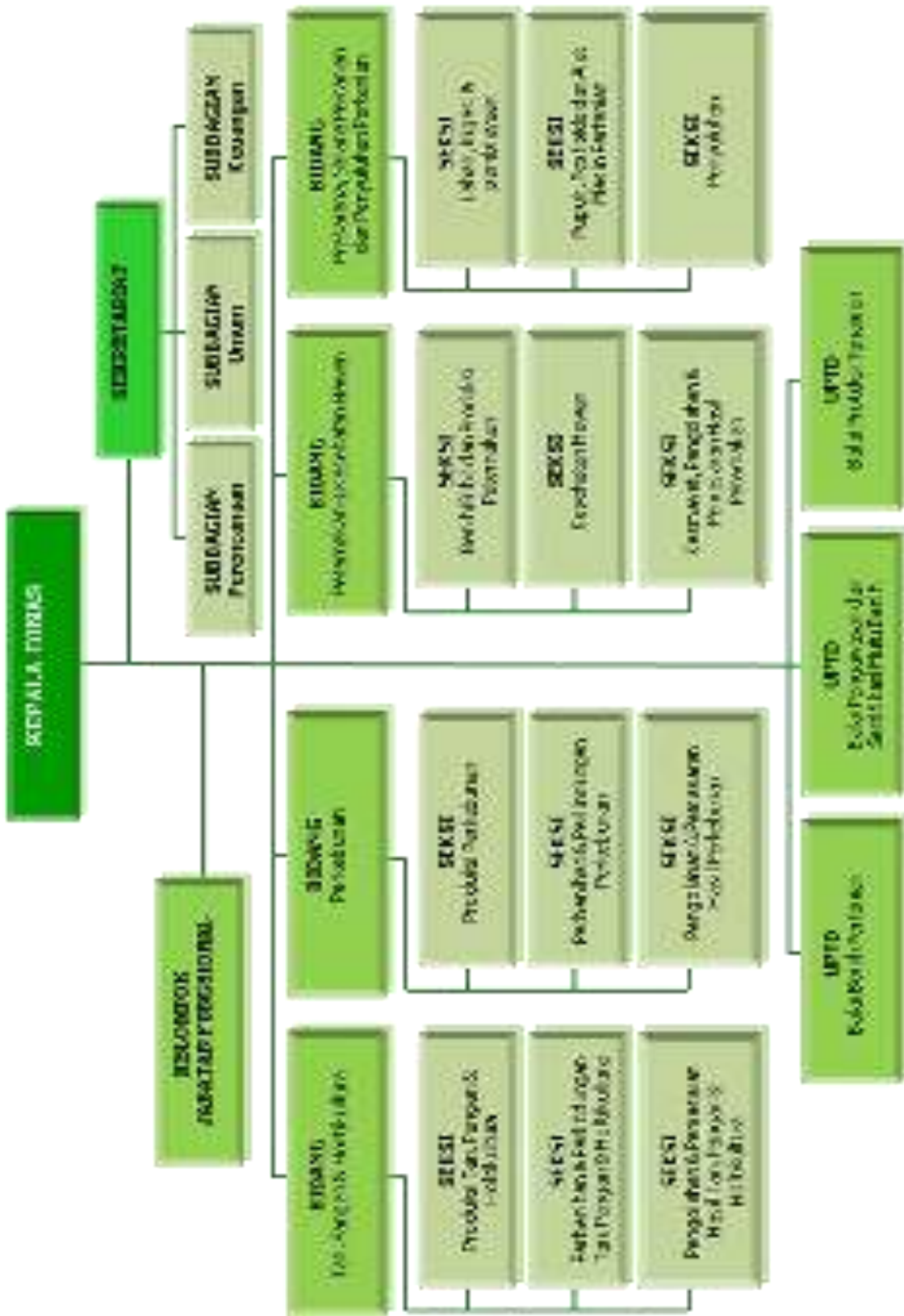
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Mendorong Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan ;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
- e. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi benih/bibit Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan ; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- f. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 1. Balai Benih Pertanian;
 2. Balai Proteksi Tanaman dan;
 3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.2. Fungsi dan Tugas

Dalam Fungsinya Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan, serta
5. Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang pertanian sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian;

- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pertanian meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pertanian mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan prasarana, sarana pertanian dan program penyuluhan pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan pertanian;
 - h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
 - j. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakandan pemberian bimbingan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;

- f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian rekomendasi teknis izin usahadi bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah kabupaten/kota;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai aparatur sipil negara;
- i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. Penyelenggaraan fungsilain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim perkebunan;
- f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;
- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang perkebunan lintas daerah kabupaten/kota;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai aparatur sipil negara;
- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memverifikasi,

mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai aparatur sipil negara;
 - l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
7. UPTD Balai Benih Pertanian
- Balai Benih Pertanian mempunyai melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian di bidang perbanyakan benih tanaman, menyebarluaskan dan pengembangan teknologi benih dan bibit bermutu varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan UPTD.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit Pertanian

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan, peredaran mutu benih dan sertifikasi mutu benih pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. UPTD Balai Proteksi Tanaman

Balai Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman meliputi peramalan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;

- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- c. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Keadaan Pegawai

Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan perangkat dinas atau personil-personil yang memenuhi persyaratan dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Status serta Pangkat/Golongan pada Dinas Pertanian Tahun 2019.

Status Pegawai	Jmlh	GOLONGAN													
		I d	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	IV c	IV d	
1. PNS	126	0	0	2	6	7	15	26	36	19	10	4	1	0	
2. CPNS	0														
3. THL	136														
TOTAL	262	0	0	2	6	7	15	26	36	19	10	4	1	0	

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pertanian pada Tahun 2019.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana/ S2	17	4	21
3	Sarjana/ S1	41	28	69
4	Profesi	4	1	5
5	Diploma-IV	0	0	0
6	Diploma-III	10	7	17
7	Diploma-I/ II	0	0	0
8	SLTA	12	2	14
9	SLTP	0	0	0
TOTAL		84	42	126

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pertanian pada Tahun 2019.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana/ S2	0	0	0
3	Sarjana/ S1	24	28	52
4	Profesi	0	0	0
5	Diploma-IV	0	0	0
6	Diploma-III	5	4	9
7	Diploma-I/ II	0	0	0
8	SLTA	41	20	61
9	SLTP	9	2	11
10	SD	2	1	3
TOTAL		81	55	136

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 1.4. Jumlah pegawai Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jabatan per Desember 2019

No	Uraian	Jumlah Riil	Jumlah Ideal
1	Pejabat eselon II	1	1
2	Pejabat eselon III	8	8
3	Pejabat eselon IV	24	24
Jumlah		33	33

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 1.5. Jumlah pegawai Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sebaran di Unit Kerja

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	a. Sekretariat	19
	b. Bidang Tan. Pangan dan Hortikultura	12
	c. Bidang Perkebunan	13
	d. Bidang Peternakan	21
	e. Bidang PSP dan Penyuluhan Pertanian	25
2	Balai Benih Pertanian	9
3	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	13
4	Balai Proteksi Tanaman	14
Jumlah		126

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu

No	Uraian	Jumlah
1.	Perencana	1
2.	Pranata Komputer	1
3.	Penyuluh Pertanian	13
4.	PMHP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian)	5
5.	APHP (Analisis Pasar Hasil Pertanian)	1
6.	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	10
7.	Pengawas Bibit Ternak (PBT)	8
8.	Medik Veteriner	1
9.	Paramedik Veteriner	3
10.	Pengawas Mutu Pakan	5
11.	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	1
Jumlah		50

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

1.4. Keadaan Sarana Prasarana (Aset)

Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya yang memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, sebagai berikut :

Tabel 1.7. Data Inventarisasi Aset Dinas Pertanian Proinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	TANAH	1.053.355 M²
2	PERALATAN DAN MESIN	2.331 Unit
	a. Alat-alat Besar	5 Unit
	b. Alat-alat Angkutan	49 Unit
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	94 Unit
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	5 Unit
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.552 Unit
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	158 Unit
	g. Alat-alat Kedokteran	69 Unit
	h. Alat-alat Laboratorium	396 Unit
	i. Alat-alat Keamanan	3 Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	50 Unit
	a. Bangunan Gedung	49 Unit
	b. Bangunan Monumen	1 Unit
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	20 Unit
	a. Jalan dan Jembatan	5 Unit
	b. Bangunan Air/Irigasi	6 Unit
	c. Instalasi	8 Unit
	d. Jaringan	1 Unit
5	ASET TETAP LAINNYA	11.483 Buah
	a. Buku Perpustakaan	234 Buah
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	- Buah
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	11.249 Buah
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1 Unit

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Kondisi sarana prasarana (aset) sebagaimana yang tersaji di atas belum ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5. Isu Strategis

Berdasarkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan beberapa isu strategis pertanian sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;
2. Sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran;

3. Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah.
4. Lahan Pertanian :
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian;
 - b. Konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian;
 - c. Kecenderungan penurunan kualitas lahan, sebagai akibat pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus menerus;
 - d. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit;
 - e. Lahan untuk usaha ternak yang belum cukup tersedia;
 - f. Ketidakpastian status kepemilikan lahan.
5. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;
6. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
7. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian
 - a. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi;
 - b. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk;
 - c. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di sektor pertanian;
 - d. Belum Optimalnya peran penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani;
8. Terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu baik lingkungan internal maupun eksternal tersebut, maka dapat disimpulkan, isu strategis bidang pertanian terkonsentrasi pada kontribusi sektor pertanian terhadap :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.

Kondisi terkini dan isu-isu strategis pembangunan pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituangkan sebagai kebijakan pada sektor pertanian adalah :

1. Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah (padi, jagung, cabai, bawang merah, sapi, lada dan karet);
2. Kebijakan pengembangan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional serta penyediaan bahan baku agroindustri;
3. Kebijakan pengembangan dan penguatan system/kelembagaan perbenihan/perbibitan;
4. Kebijakan pengembangan Infrastruktur, Sarana Prasarana Pertanian sebagai dukungan pengembangan pertanian berkelanjutan;
5. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan handal melalui peningkatan sistem penyuluhan, pendidikan dan latihan pertanian;
6. Pengembangan kawasan berbasis pertanian mendukung program tematik : Pengembangan lapangan pekerjaan (ketenagakerjaan); Pengembangan kawasan strategis KTM Batu Betumpang, KTM Gantung; Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; Penurunan angka kemiskinan dan penurunan inflasi di bidang pertanian;
7. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

1.6. Keuangan

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 khususnya APBD pada awalnya atau Pagu APBD Induk sebesar Rp 49.283.109.090,45 dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 17.834.328.015,45 dan Belanja Langsung sebesar Rp 31.448.781.075,00 selanjutnya pada APBD Perubahan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 6.082.506.022,55 menjadi Rp 55.365.615.113,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.515.724.838,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 35.849.890.275,00, dengan rincian anggaran per program/kegiatan sebagaimana tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian Proinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kode Belanja	Uraian	Realisasi Waktu Fisik (Rp)	Realisasi Fungsional (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
	103.81.81	BIDANG LAYANAN PUBLIK	48.382.958.890,48	48.382.958.712,00	4.482.504.003,54
	3	BELANJA	48.382.958.890,48	48.382.958.712,00	4.482.504.003,54
1.	81	BELANJA TENGAH LANGSUNG	17.824.228.815,48	19.815.734.838,00	1.891.506.022,52
	81.5	Belanja Pegawai	17.824.228.815,48	19.815.734.838,00	1.891.506.022,52
	81.5.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.824.228.815,48	19.815.734.838,00	1.891.506.022,52
8.	82	BELANJA LANGSUNG	30.448.761.875,00	28.445.880.278,00	4.461.188.288,00
A.	300.300.1.81	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	7.348.812.828,00	8.828.348.828,00	1.280.332.588,00
1	300.300.1.81.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.434.505.825,00	7.238.328.825,00	808.590.380,00
2	300.300.1.81.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	793.258.800,00	1.148.872.800,00	255.214.800,00
3	300.300.1.81.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.260.800,00	284.260.800,00	104.000.000,00
4	300.300.1.81.04	Pelaksanaan Ditaman perikanan zambangrat	81.867.800,00	81.867.800,00	-
5	300.300.1.81.05	Pertamanan Peligian Capaian Rangka dan Rancangan	87.870.800,00	87.870.800,00	-
B.	300.300.1.82	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	864.200.800,00	817.882.880,00	1.234.588.080,00
6	300.300.1.82.01	Program pengembangan teknologi hortikultura melalui penelitian, teknologi pertanian yang baik	447.712.800,00	338.412.800,00	1.145.588.080,00
7	300.300.1.82.02	Pengembangan komoditas program unggulan perikanan (IP-PT) (gudang dan unggas)	818.528.800,00	229.528.880,00	1.781.088.080,00
8	300.300.1.82.15	Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	135.540.800,00	63.840.880,00	142.088.080,00
C.	300.300.1.83	Program Pengembangan Perikanan, Sarana Perikanan dan Perikanan Perikanan	4.998.815.800,00	5.815.711.880,00	11.822.114.088,00
9	300.300.1.83.00	Pengembangan program ikan budi daya	682.828.800,00	682.828.800,00	-
10	300.300.1.83.01	Pembinaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan penyuluhan perikanan	505.200.800,00	605.280.800,00	-
11	300.300.1.83.02	Pengembangan budidaya ikan air tawar	788.820.800,00	788.820.800,00	-
12	300.300.1.83.03	Pengembangan budidaya perikanan dan air tawar perikanan	378.880.800,00	378.880.800,00	-
13	300.300.1.83.04	Peningkatan kapasitas penelitian dan SDM Perikanan	862.128.800,00	862.128.800,00	-
14	300.300.1.83.18	Pembinaan usaha perikanan dan perikanan perikanan	50.800.800,00	50.800.800,00	-
15	300.300.1.83.19	Pembinaan usaha perikanan	688.212.800,00	688.212.800,00	-
16	300.300.1.83.13	Fasilitas usaha perikanan	121.288.800,00	121.288.800,00	-
17	300.300.1.83.14	Pengembangan perikanan	1.452.118.800,00	1.442.880.800,00	11.222.114.088,00
D.	300.300.1.84	Program Pengembangan Perkebunan	4.248.962.800,00	7.847.862.880,00	5.381.588.080,00
18	300.300.1.84.01	Intensifikasi tanaman perkebunan	3.111.880.800,00	7.252.880.800,00	5.541.488.080,00
19	300.300.1.84.02	Peningkatan daya tahan tanaman perkebunan	348.280.800,00	318.780.800,00	281.588.080,00
20	300.300.1.84.11	Peningkatan efisiensi perikanan perikanan perikanan	388.212.800,00	388.212.800,00	-
21	300.300.1.84.15	Pelayanan informasi perikanan hasil perikanan	217.880.800,00	288.880.800,00	1.281.888.080,00
F.	300.300.1.86	Program Pengembangan Perikanan dan Kesehatan Hewan	2.878.412.750,00	2.878.412.750,00	-
22	300.300.1.86.01	Peningkatan produksi ikan	2.228.112.800,00	2.228.112.800,00	-
23	300.300.1.86.02	Peningkatan produktivitas dan peningkatan hasil produksi budidaya perikanan	208.880.800,00	208.880.800,00	-
24	300.300.1.86.04	Peningkatan fungsi pelayanan laboratorium kesehatan dan kesehatan hewan	208.880.750,00	208.880.750,00	-
25	300.300.1.86.05	Pembinaan kesehatan dan perikanan perikanan perikanan perikanan	118.880.800,00	118.880.800,00	-
26	300.300.1.86.02	Subsidi penggantian modal hasil budidaya ikan & KEM	2.800.800,00	2.800.800,00	-

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Startegis*
2. *Perjanjian Kinerja*
3. *Rencana Anggaran dan Indikator Kinerja*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1. Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Menginjak tahun 2019 yang merupakan periode ke dua dari RPJMD Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Visi dan Misi pimpinan daerah terpilih yaitu :

2.1.1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yaitu untuk mewujudkan :

“ Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi ”.

2.1.2. Misi

Upaya mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
- (2) Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
- (4) Meningkatkan kesehatan masyarakat;
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, dan;
- (6) Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 tersebut maka Dinas Pertanian wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor pertanian, kajian lingkungan hidup strategis. Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 telah disusun dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, dokumen Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 dan Renstra Dinas Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis yang berlandaskan keterkaitan pada Misi 1 (satu) pada RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah", dan dalam upaya mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, serta program khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu 3-S (Sahang/Lada, Sapi dan Sawah), maka Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2022.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu pembangunan pertanian maka perlu menetapkan tujuan strategis perangkat daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah;
2. Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil pertanian di tingkat petani;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1. Kerangka sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2017 (awal)	2018	2019	2020	2021	2022
1.1. Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis	a) Produksi Padi (Ton)	38.393	40.313	43.135	47.017	52.188	60.017
	b) Populasi Sapi (Ekor)	11.545	13.090	14.399	15.838	17.422	19.164
1.2. Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah	a) Produksi Lada (Ton)	39.153	41.111	43.577	46.628	49.892	53.883
	b) Produksi Karet (Ton)	56.864	58.438	60.173	61.407	62.481	63.575

Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian	a) Jumlah kelompok yang peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura (pelaku usaha/poktan)	10	30	40	50	60	70
	b) Jumlah kelompok yang menerapkan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Perkebunan (pelaku usaha/poktan)	6	8	10	12	14	16
	c) Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Peternakan (pelaku usaha/poktan)	4	8	14	20	26	32
Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Petani	NTP Subsektor Pertanian (%)	95,83	96,82	97,82	99,07	100,10	101,37

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

2.1.4. Strategi, Kebijakan dan Program

Upaya pencapaian atau merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlunya menentukan langkah-langkah bagaimana hal tersebut dapat dicapai yang merupakan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu dengan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas akan dapat dicapai dengan penentuan-penentuan seperangkat kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Secara keseluruhan, kerangka strategi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

❖ Strategi

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah/kawasan pertanian berkelanjutan;
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
3. Meningkatkan jumlah kelompok/pelaku usaha yang menerapkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian serta pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), melalui pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan petani;
4. Pengembangan kawasan berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
5. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung produksi pertanian, (mengembangkan jaringan irigasi dan optimasi

- air, meningkatkan luas areal di lahan pertanian, menyiapkan kebutuhan pupuk dan pestisida, dan menyiapkan kebutuhan alat mesin pertanian);
6. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan DPI serta melakukan mitigasi akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
 7. Optimalisasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan sebagai penghasil benih/bibit bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi sertifikasi benih/bibit sebagai penjamin penggunaan benih/bibit bermutu di masyarakat;
 8. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian, dalam rangka menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian melalui pendampingan, pengawalan, pelatihan, fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
 9. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas melalui perbaikan manajemen dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 10. Pelayanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan regulasi dan pengelolaan perencanaan.

❖ Kebijakan

Pokok-pokok arah kebijakan pembangunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2017-2022 pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sektor pertanian sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Kebijakan peningkatan dan pengembangan Infrastruktur, kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Pertanian sebagai dukungan pengembangan pertanian berkelanjutan;
3. Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah (padi, jagung, cabai, bawang merah, sapi, lada dan karet);
4. Kebijakan pengembangan produk pertanian yang berkualitas, berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional, dan mempunyai nilai tambah serta penyediaan bahan baku agroindustri;
5. Kebijakan peningkatan dan pengembangan benih/bibit yang berkualitas, penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/ perbibitan;
6. Kebijakan penurunan serangan dan gangguan OPT/DPI pada sektor pertanian;

7. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan handal melalui peningkatan sistem penyuluhan, pendidikan dan latihan pertanian;
8. Kebijakan Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
9. Kebijakan Pengembangan kawasan berbasis pertanian, seperti Kawasan Lada, Kawasan Budidaya Pertanian di KTM Batu Betumpang, Kawasan Budidaya Pertanian di KTM Gantung, dan Kawasan Peternakan;
10. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi di sektor pertanian, dan;
11. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Tabel 2.2. Rumusan Pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul Di Bidang Inovasi Agropolitan Dan Bahari VISI : Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efisien Dan Cepat Berbasis Teknologi.			
MISI - 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan produksi komoditas strategis dan unggulan daerah	1) Meningkatnya produksi pangan strategis (Padi, Sapi); 2) Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah (Lada dan Karet).	1) Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; 2) Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis korporasi; 3) Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian.	1) Peningkatan produksi, sarana, prasana dan nilai tambah produk pertanian; 2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan dan peternakan; 3) Penyusunan kebijakan dan implementasi PLP2B; 4) Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian
Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil pertanian di tingkat petani	Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian	Meningkatkan jumlah kelompok/pelaku usaha yang menerapkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, melalui pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan petani	Peningkatan produksi, sarana dan prasana dan nilai tambah produk pertanian.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani	Meningkatnya NTP sektor Pertanian	Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian	Peningkatan produksi, sarana dan prasana dan nilai tambah produk pertanian.

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

❖ Program

Dengan ditetapkan strategi dan kebijakan dan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan **Program dan Kegiatan** prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian yaitu :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;
- 2) Program Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian;
- 3) Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 4) Program Pengembangan Perkebunan;
- 5) Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Pengembangan Benih Pertanian
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih;
- 8) Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman.

❖ **Kegiatan**

Kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 dalam mendukung tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 41 Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 2.3 berikut.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019
1.1. Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis	a) Produksi Padi	Ton	43.135
	b) Populasi Sapi	Ekor	14.399
1.2. Meningkatnya produksi komoditas unggulan daerah	a) Produksi Lada	Ton	43.577
	b) Produksi Karet	Ton	60.173
2. Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian	a) Jumlah kelompok yang menerapkan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Perkebunan	pelaku usaha/ poktan	10
	b) Jumlah kelompok yang peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	pelaku usaha/ poktan	40
	a) Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Peternakan	Pelaku usaha/ poktan	14
3. Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Petani	NTP Subsektor Pertanian	(%)	97,82

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pengukuran indikator produksi merupakan perolehan dari jumlah produksi setiap komoditas (Padi, Lada dan Karet) dengan cara menghitung produksi dalam satuan ton produksi dari total luas panen (ha) tanaman menghasilkan dan menjumlahkan hasil populasi sapi selama 1 tahun dengan cara menghitung seluruh populasi ternak sapi dalam kurun 1 (satu) tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengukuran indikator pendapatan dan kesejahteraan petani yang diukur melalui NTP Sektor Pertanian diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase

sumber data dari BPS kemudian diakhir tahun dirata-rata). Pengukuran indikator dengan cara menjumlahkan indikator Angka NTP per bulan per subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, kemudian dibagi jumlah subsektor menghasilkan rerata NTP sektor Pertanian.

2.3. Rencana Belanja dan Indikator Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan melaksanakan kegiatan dengan total anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 55.365.615.113,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 19.515.724.838,00 dan Belanja Langsung Rp 35.849.890.275,00.

Adapun Rencana Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2017-2022. secara rinci Rencana Belanja dan Indikator Kinerja sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Rincian Belanja dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

KODE	URAIAN BELANJA / INDIKATOR KINERJA	PAGU APBD TA 2019 / INDIKATOR KINERJA
2.01	BIDANG URUSAN PERTANIAN	55.365.615.113,00
	a) Produksi Padi	43.135 Ton
	b) Populasi Sapi	14.399 Ekor
	c) Produksi Lada	43.577 Ton
	d) Produksi Karet	60.173 Ton
	e) Jumlah Kelompok yang menerapkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil TPH	40 Pelaku usaha/Poktan
	f) Jumlah Kelompok yang menerapkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil Perkebunan	10 Pelaku usaha/Poktan
	g) Jumlah Kelompok yang menerapkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil Peternakan	14 Pelaku usaha/Poktan
	h) NTP Sektor Pertanian	97,82 %
	✓ NTP Subsektor Tanaman Pangan	95,08 %
	✓ NTP Subsektor Hortikultura	100,75 %
	✓ NTP Subsektor Perkebunan	100,60 %
	✓ NTP Subsektor Peternakan	94,86 %
5	BELANJA	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.515.724.838,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	35.849.890.275,00

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019

2.4. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dalam hal ini adalah dokumen perjanjian kinerja untuk Eselon II, III dan IV yang merupakan perjanjian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Pejabat Eselon II, III, dan IV sebagaimana terlampir.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

3.1. Capaian Kinerja

Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91-100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76-90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66-75	Sedang	Kuning Tua
4.	51-65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019 *)	Persentase (%)	Kriteria/ Kode
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas strategis dan unggulan daerah	Produksi Padi	Ton	43.135	37.829	88	Tinggi
		Populasi Sapi	Ekor	14.399	15.039	104	Sangat Tinggi
		Produksi Lada	Ton	43.577	33.038	76	Tinggi
		Produksi Karet	Ton	60.173	56.164	93	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian	Jumlah Poktan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	Kelp	40	38	95	Sangat Tinggi

		Jumlah Poktan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Perkebunan	Kelp	10	36	360	Sangat Tinggi
		Jumlah Poktan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Peternakan	Kelp	14	15	107	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani	NTP Sektor Pertanian	(%)	97,82	89,12	91,11	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan : *) = Angka Sementara

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari tabel 3.2 diatas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi ke dalam 8 (delapan) indikator. Pada tahun 2019, 3 (tiga) indikator atau sebesar 37,5% dari total indikator telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu pencapaian target dengan predikat sangat tinggi bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 25% dari total indikator dengan predikat tinggi dengan kriteria baik. Adapun capaian yang tertinggi pada indikator jumlah poktan yang telah menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil perkebunan dengan persentase capaian kinerja mencapai 360% sementara indikator yang mengalami capaian terendah namun dengan predikat tinggi adalah produksi lada dengan persentase 76%.

Dari data pada tabel 3.2 diatas, hasil total realisasi kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan mencapai 92,87% yang dihitung dari total persentase realisasi indikator ($>100\% \cong 100\%$) dibagi jumlah indikator.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci per indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan daerah

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian target indikator kinerja yakni faktor penghambat yaitu rendahnya harga komoditi yang dibudidayakan sehingga menimbulkan keengganan bagi petani dalam melakukan usaha pertanian atau pemeliharaan yang tidak intensif untuk komoditi tersebut. Sementara untuk faktor pendorongnya adalah dikarenakan gencarnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah

untuk memberikan pelatihan serta bantuan sarana prasarana kepada petani serta merupakan mata pencaharian utama. Strategi yang ditempuh untuk mencapai target indikator sasaran yaitu :

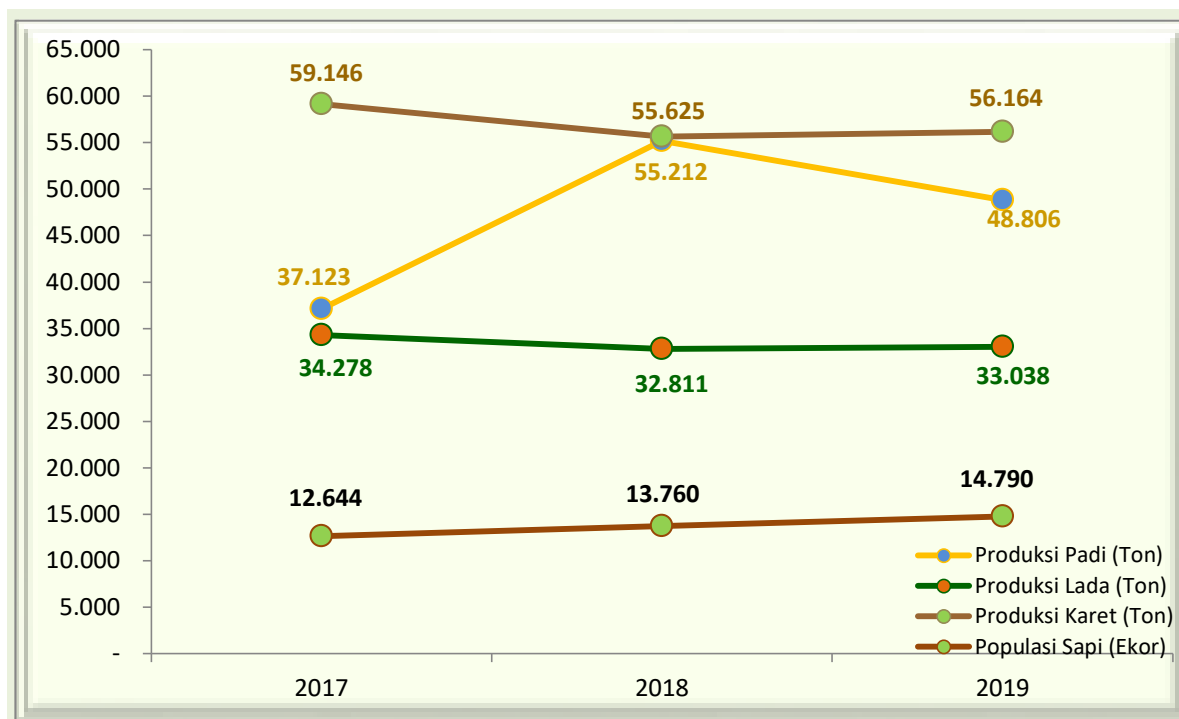
- a. Pengembangan kawasan pertanian Strategis dan Unggulan Daerah berbasis korporasi;
- b. Peningkatan teknologi produksi melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP)/Standart Operating Procedure (SOP), penerapan teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan, Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
- c. Pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim;
- d. Peningkatan kemampuan petani dan petugas melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan bagi petani dan penyuluh pertanian;
- e. Pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian melalui penguatan kelembagaan.

Namun demikian, keberhasilan kinerja Dinas Pertanian selain dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 juga dapat dilihat dari capaian angka data statistik produksi sebagaimana data produksi dibawah ini.

Tabel 3.3. Data Statistik Perkembangan Komoditas dalam Indikator Kinerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019

No	KOMODITAS	Data Perkembangan per Tahun			
		2017	2018	2019 **)	
1.	PADI				
	a. Luas Tanam	Ha	20.799	28.068	20.049
	b. Luas Panen	Ha	16.080	21.659	17.088
	c. Produksi	Ton	37.123	55.212	48.806
	d. Produktivitas	Ton/Ha/Th	2,31	2,55	2,86
2.	LADA				
	a. Luas Areal Tanaman	Ha	52.350	51.404	52.240
	b. Luas Tanaman Menghasilkan (TM)	Ha	27.952	27.988	28.404
	c. Produksi	Ton	34.278	32.811	33.038
	d. Produktivitas	Ton/Ha/Th	1,23	1,17	1,16
3.	KARET				
	a. Luas Areal Tanaman	Ha	80.991	81.799	82.091
	b. Luas Tanaman Menghasilkan (TM)	Ha	50.035	52.128	52.582
	c. Produksi	Ton	59.146	55.625	56.164
	d. Produktivitas	Ton/Ha/Th	1,18	1,07	1,07
4.	SAPI				
	a. Populasi Sapi	Ekor	12.644	13.760	14.790
	b. Produksi	Kg / Th	2.601.432	3.065.933	3.259.812

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan : *) = Angka Sangat Sementara



Grafik 3.1 Capaian Kinerja Produksi Komoditas Strategis dan Unggulan Daerah Tahun 2017 – 2019

a. Produksi Padi

Komoditas padi memiliki peran yang sangat penting dikarenakan merupakan bahan makan pokok sebagian besar penduduk Indonesia sehingga merupakan bahan pangan yang sangat strategis. Karena peran strategis tersebut maka harga dikendalikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa produksi padi total tahun 2019 turun dari tahun 2018 sebesar 17.383 ton (-45,95%). Angka ini merupakan angka sangat sementara (ASEM) dimana data yang disampaikan dan terekap dalam aplikasi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum benar-benar mencapai 100%. Sebagai informasi data produksi padi maupun data produksi pertanian didapat dari mantri statistik (BPS) dan mantri tani (Distan) yang diperoleh dari setiap desa/kelurahan yang kemudian dikirim ke tingkat kecamatan, kabupaten selanjutnya sampai tingkat provinsi kemudian antara BPS dan Dinas Pertanian memverifikasi dan menyepakati data tersebut untuk dijadikan angka tetap (ATAP) tingkat nasional. Selain daripada itu kemungkinan yang sangat mempengaruhi penurunan data produksi padi tersebut adalah dikarenakan luas panen, produktivitas padi yang mengalami penurunan sehingga hasil produksi di tahun 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya gagal panen, dimana terjadinya keadaan atau iklim/cuaca panas yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan lahan dan berdampak pada padi mengalami puso dan produktivitas menurun, selain adanya serangan hama penyakit juga menyebabkan penurunan hasil produksi padi.

b. Populasi Sapi

Selain padi (beras) komoditi Sapi (daging) juga memiliki peran sangat penting dikarenakan merupakan komoditi strategis dalam pemenuhan pangan dan gizi masyarakat, oleh karena itu perlunya peran pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan ternak Sapi.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa populasi Sapi tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 1.279 ekor (+8,51%) yang didukung dengan keterlibatan aktif tim teknis lapangan terdiri dari petugas teknis reproduksi di lapangan yang terdiri dari medik veteriner, ATR, petugas IB dan petugas PKB yang berkompeten, selain itu adanya pencaangan gerakan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB). Namun demikian, walaupun angka populasi sapi yang mengalami kenaikan tetapi kebutuhan pangan akan daging sapi masih didatangkan dari luar daerah sebesar 80%.

c. Produksi Lada

Komoditas yang tidak kalah memiliki peran pentingnya dengan 2 (dua) komoditas diatas yaitu Komoditas Lada, hal ini dikarenakan Lada merupakan komoditas unggulan daerah yang diusahakan oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung secara turun temurun dan berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu perlunya peran pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan tanaman lada melalui mengembalikan kejayaan rempah nasional salah satunya komoditas lada.

Berdasarkan tabel produksi di atas diketahui bahwa produksi lada total tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 227 ton (+0,69%) yang dipengaruhi oleh kenaikan luas tanaman menghasilkan sebesar 416 ton (+1,46%). Namun demikian produktivitas tanaman lada mengalami penurunan sebesar 0,01 ton/ha, hal ini dapat terjadi dikarenakan selain adanya tanaman tua yang mulai mengalami penurunan produktivitasnya, juga dikarenakan adanya dampak dari harga yang menurut sebagian besar pekebun lada tidak menguntungkan sehingga kurang intensifnya pekebun dalam memelihara tanaman lada.

Bantuan pemerintah daerah yang dilakukan pada Tahun 2019 yaitu melalui kegiatan bantuan langsung bibit lada, tidak langsung berdampak pada tahun berjalan melainkan baru akan dirasakan dampaknya pada 2-3 tahun yang akan datang.

d. Produksi Karet

Komoditas subsektor perkebunan unggulan daerah lainnya yaitu komoditas Karet yang tidak kalah penting pentingnya dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah karena komoditas karet juga mempunyai nilai ekspor sehingga perlunya peran pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan tanaman karet.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa produksi karet tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 539 ton (0,96%) yang dipengaruhi oleh kenaikan luas tanaman menghasilkan karet sebesar 454 ton.

Terkait dengan data angka statistik yang disajikan dalam dokumen LAKIP ini mengacu pada periode penghitungan angka dalam setahun oleh Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Pertanian dan BPS. Kementerian Pertanian dan BPS melakukan tiga kali rilis dengan lima status angka produksi tanaman pangan yaitu, Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP).

Periode Rilis oleh BPS :

- a. ARAM I tahun berjalan dan ASEM tahun sebelumnya dirilis setiap Februari atau awal bulan Maret-Juni;
- b. ARAM II tahun berjalan dan ATAP tahun sebelumnya dirilis setiap Awal bulan Juli-Agustus;
- c. ARAM III tahun berjalan dirilis setiap awal bulan November.

3.2.2. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani melalui peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pendapatan petani melalui peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu jumlah kelompok tani yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian dan indikator Nilai Tukar Petani sektor pertanian (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019

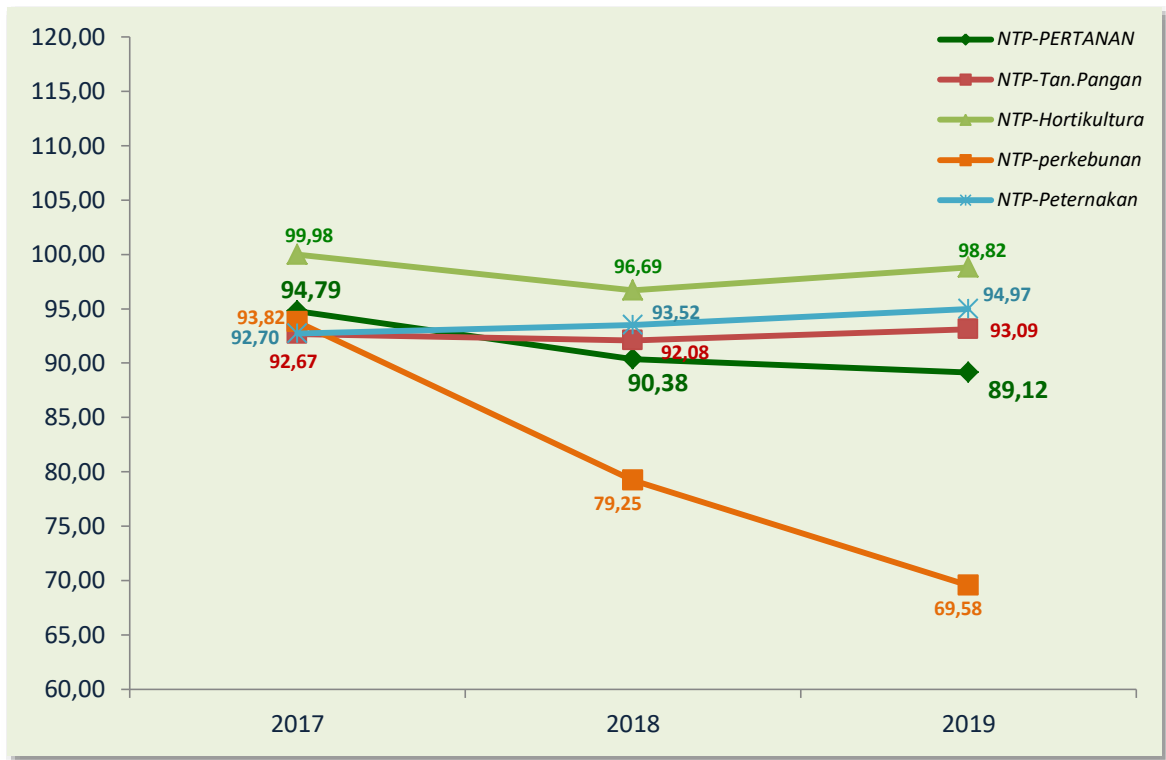
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019 *)	Persentase Capaian (%)
2.	Meningkatnya mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian	Jumlah Poktan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	Kelp	30	40	38	95,00
		Jumlah Poktan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil	Kelp	31	10	36	360,00

		Perkebunan					
		Jumlah Poktan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil Peternakan	Kelp	8	14	15	107,14
3.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani	NTP Sektor Pertanian	(%)	96,82	97,82	89,12	91,11
		▪ NTP Sub sektor Tan. Pangan	(%)	92,08	95,08	93,09	97,91
		▪ NTP Sub sektor Hortikultura	(%)	96,69	100,75	98,82	98,08
		▪ NTP Sub sektor Perkebunan	(%)	79,25	100,60	69,58	69,17
		▪ NTP Sub sektor Peternakan	(%)	93,52	94,86	94,97	100,12

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Berdasarkan tabel 3.4 Indikator capaian kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2019 tidak memenuhi indeks target yang diharapkan sebesar 98,12% yaitu hanya mencapai 89,12% atau 90,83% dari target yang diharapkan. Begitu juga, apabila dilihat dari capaian kinerja berdasarkan data riil, NTP-Pertanian mengalami penurunan sebesar 1,42%, sedangkan dilihat dari NTP per-subsektor maka hanya subsektor perkebunan yang mengalami penurunan NTP sedangkan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Sehingga disimpulkan bahwa NTP Subsektor Perkebunan yang mempengaruhi tingkat penurunan NTP-Pertanian tahun 2019 terhadap tahun 2018.



Grafik 3.2 Capaian Kinerja Perkembangan NTP-Pertanian Tahun 2017 – 2019

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian realisasi anggaran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicerminkan dengan penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 94,95% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 25.774.120.420,00. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran kinerja relatif lebih baik. Penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2018 telah mencukupi atau adanya efisiensi anggaran khususnya pada belanja modal atau belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Keuangan dan Kegiatan APBD Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019

**LAPORAN AN-10 REALISASI MELAKUKAKAN KEGIATAN DAN KEMUDAHAN
DIHARGI PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DITURUNKAN DARI APBD PROGRAM KEGIATAN KEMUDAHAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN BERKEMUDAHAN DIKAWALIRI APBD TA 2019					
No	Kode Akun	Kategori	Kategori Sub-Objektif	Realisasi	
				Anggaran	Realisasi
				100%	
1	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
2	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
3	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
4	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
5	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
6	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
7	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
8	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
9	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
10	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
11	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
12	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
13	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
14	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
15	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
16	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
17	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
18	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
19	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
20	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
21	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
22	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
23	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
24	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
25	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
26	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
27	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
28	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
29	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
30	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
31	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
32	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
33	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
34	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
35	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
36	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
37	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
38	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
39	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000
40	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000	100.0000.0000

No	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR FISIKA	INDIKATOR KEUANGAN	REALISASI (%)		SALDO (%)
					FAKTA	TRAJEKTORI	
1	529.1.01.1.02	Program Peningkatan Produktivitas Petani Pengembangannya	1.000.000	7.211.000.000	8.211.000.000	111%	882%
2	529.1.01.1.02.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
3	529.1.01.1.02.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
4	529.1.01.1.02.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
5	529.1.01.1.02.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
6	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
7	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
8	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
9	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
10	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
11	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
12	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
13	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
14	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
15	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
16	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
17	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
18	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
19	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%
20	529.1.01.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Membantu petani pengembangannya	500.000	3.605.000.000	4.105.000.000	103%	892%

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 3.6. Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersumber Dana APBN Tahun Anggaran 2019

The screenshot displays the SMART application interface with the following structure:

- Header:** LKJIP DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Table Columns:**
 - LC (Level of Commitment)
 - KODE KEGIATAN (Activity Code)
 - NAMA KEGIATAN (Activity Name)
 - INDIKATOR FISIKA (Physical Indicator)
 - INDIKATOR KEUANGAN (Financial Indicator)
 - REALISASI (Realization) - split into Faktual (Factual) and Trajektori (Trajectory)
 - SALDO (%) (Balance %)
- Content:** The table lists various agricultural activities such as "Program Peningkatan Produktivitas Petani" and "Membantu petani pengembangannya" with their respective indicators and realization percentages.

Sumber : Aplikasi SMART <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2019/>

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019, dari 3 (tiga) sasaran kinerja strategis terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Dari hasil analisis terdapat 6 (enam) indikator yang telah memenuhi target sangat baik atau kriteria sangat tinggi atau mencapai 75% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 25% dengan kriteria tinggi atau baik. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala khususnya faktor eksternal;
3. dari ketiga IKU atau sasaran utama yang dinyatakan Berhasil adalah yang capaian kinerjanya 91-100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019. IKU tersebut secara berurutan adalah Jumlah Populasi Sapi, Jumlah Produksi Karet dan Jumlah kelompok Tani yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian (Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan Nilai Tukar Petani. Sementara untuk IKU Jumlah Produksi Padi, Lada (ton/ha/tahun) belum mencapai target yang sangat tinggi.

4.2. Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Aksi sebagai berikut :

1. Peningkatan teknologi produksi melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP)/Standart Operating Procedure (SOP), penerapan teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan antara lain dengan pengembangan inkubator bisnis;
2. Pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian melalui

penguatan kelembagaan dan usahanya salah satunya dengan pengembangan corporate farming;

3. Pengembangan penyuluhan pertanian dan SDM Pertanian melalui pemberdayaan penyuluhan pertanian, pelatihan, bimbingan teknis, magang, sekolah lapang;
4. Pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



- LAMPIRAN -

Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV
Dokumen Pendukung Lainnya



**DINAS PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2020**